

## **ABSTRAK**

Bima Saputra, 2026; Analisis Kinerja Pajak Daerah Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Di bawah bimbingan Bapak Asim Asy'ari, S.E., M.Ak.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pajak Daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan fokus pada laju pertumbuhan pajak, efektivitasnya, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode 2022-2024. Analisis menggunakan metode analisis tingkat pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi untuk mengevaluasi kinerja Pajak Daerah dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal. Temuan menunjukkan fenomena efektivitas pajak lokal yang tinggi namun pertumbuhan yang rendah. Meskipun sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Timur secara konsisten mencapai tingkat efektivitas pemungutan pajak yang tinggi, melebihi 100 persen dari target pendapatan, pertumbuhan Pajak Daerah tetap rendah dan masuk dalam kategori tidak berhasil. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas yang tinggi dipengaruhi oleh penerapan sistem pemungutan pajak berbasis aplikasi digital dan penetapan target yang terlalu rendah (target yang diremehkan), yang dapat menjadi penyebab utama efektivitas tinggi namun pertumbuhan rendah. Selain itu, pertumbuhan Pajak Daerah yang rendah juga dipengaruhi oleh struktur PDRB Jawa Timur, di mana sebagian besar kabupaten/kota non-industri masih bergantung pada sektor pertanian, yang umumnya bukan objek utama penerimaan Pajak Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pajak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

## ABSTRACT

*Bima Saputra, 2026; Analysis Of Local Tax Performance Following The Enactment Of Law No. 1 Of 2022. Under the guidance of Mr. Asim Asy'ari, S.E., M.Ak.*

*This study aims to analyze regional tax performance in districts/cities in East Java after the implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, focusing on the tax growth rate, its effectiveness, and its contribution to regional original revenue. This study uses a descriptive quantitative approach with secondary data from 38 districts/cities in East Java Province for the period 2022-2024. The analysis uses the methods of analysis of growth rate, effectiveness ratio, and contribution ratio to evaluate regional tax performance and its impact on fiscal independence. The findings show a phenomenon of high local tax effectiveness but low growth. Although most districts and cities in East Java consistently achieve Sangat Effective tax collection rates, exceeding 100 percent of revenue targets, regional tax growth remains low and falls into the unsuccessful category. These findings indicate that high effectiveness is influenced by the implementation of a digital application-based tax collection system and the setting of targets that are too low (underestimated targets), which could be the main causes of high effectiveness but low growth. In addition, the low growth of regional taxes is also influenced by the structure of East Java's GRDP, where most non-industrial districts/cities still rely on the agricultural sector, which is generally not the main object of regional tax revenue.*

*Keywords: Regional Revenue, Regional Tax, Fiscal Decentralization, Tax Effectiveness, Law Number 1 of 2022*